

BAB IV

Peran Kalimantan Utara Sebagai Solusi Penanganan Permasalahan Perbatasan

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah dalam menangani permasalahan perbatasan di Kalimantan timur dengan berbagai kebijakan namun di rasa belum efektif. Membuat pemerintah pusat yang merasa paling bertanggung jawab dengan permasalahan di sana, kebertanggung jawaban pemerintah tersebut di sebabkan karena masalah perbatasan di anggap sangat mengancam kemandirian nasional terutama untuk keutuhan NKRI.

Untuk itulah pemerintah pusat terus mencarikan solusi untuk meninimalisir secara baik terhadap permasalahan perbatasan yang ada di Kalimantan Timur. Mulai dari Pembentukan BNPP (Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan), Peningkatan Personil dan pos jaga di setiap jalan masuk Perbatasan, dan Banyak lagi solusi yang di berikan, namun di rasa kurang efektif. sampai pada akhirnya di temukan solusi dengan cara pemekaran daerah Kalimantan timur bagian utara perbatasan menjadi provinsi sendiri yaitu provinsi Kalimantan utara di mana di harapkan peran pemerintah provinsi baru ini dapat meminimalisir permasalahan di sana secara baik.

Adapun kebijakan tersebut lahir dengan berbagai kritikan dan dukungan di mulai dari berbagai riset sampai akhirnya menjadi undang – undang yang sah. Di karenakan pemerintah pusat dengan di dukung komisi II DPR RI menanggapi

solusi daerah sebagai solusi permasalahan perbatasan di Kalimantan

Timur karenan peranan Pemerintah Provinsi sangat tepat untuk menanggulangi permasalahan di sana.

Alasan pemerintah pertama di mana Provinsi Kalimantan Utara di harapkan akan memiliki peranan sebagai salah satu solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik yang sangat minim di perbatasan. Apabila pemerintahan di perbatasan berbentuk provinsi maka dapat memperpendek rentang kendali (span of control) pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesai (NKRI) di wilayah perbatasan dengan negara tetangga.

Alasan kedua Secara geostrategis, Provinsi Kalimantan Utara merupakan open gates ke Malaysia (Sabah), Philipina Selatan dan Brunei Darussalam. Provinsi Kalimantan Utara berada pada posisi strategis sehingga dapat mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung yang membahayakan intergritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat terutama di daerah perbatasan dan pedalaman .

Alasan ketiga Secara geopolitik, Provinsi Kalimantan Utara yang terletak di belahan utara Pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan Sabah-

Malaysia, sangat berpotensi untuk meniaga kedaulatan dan membat NKRI

termanifestasikan dalam gerak dan tindak semua lapisan masyarakat di wilayah Kalimantan Utara terutama di daerah-daerah perbatasan dengan Malaysia.

Namun kondisi obyektif saat ini justru sebaliknya, di mana masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan secara perlahan mulai tereduksi semangat nasionalismenya. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, di mana daerah perbatasan 99% merupakan daerah pedalaman yang tertinggal dan tidak tersentuh pembangunan (karena panjangnya span of control dari pusat pemerintahan provinsi di Samarinda/Kalimantan Timur, sedangkan pada saat yang sama tingkat kehidupan penduduk di negara tetangga lebih baik. Di Sebatik dan Krayan misalnya, masyarakat bertransaksi dengan mata uang Ringgit dan orientasi kehidupan mereka sudah lebih condong 'termalaysiakan'⁴⁶.

Alasan keempat yaitu Salah satu faktor penting sebagai penentu kelayakan peningkatan status wilayah adalah potensi ekonomi tentang sumber daya alam. Wilayah perbatasan mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan, baik potensi sumber daya alam maupun potensi di bidang jasa, perdagangan dan wisata. Sumber daya alam terdapat di Hutan Lindung dan Taman Nasional Krayan Mentarang yang membentang di sepanjang wilayah perbatasan dengan potensi pertambangan yang belum optimal pengelolaannya di mana ketika provinsi Kalimantan Utara mengambil peranan bisa di kembangkan menjadi penghasilan daerah yang dapat menjadi modal pembangunan daerah menjadi lebih baik.

Wilayah ini juga sangat potensial untuk jasa dan perdagangan, terutama di kawasan Sebatik dan Nunukan yang letaknya sangat strategis karena berbatasan dengan Malaysia dan Philipina. Potensi lainnya di wilayah perbatasan antara lain

adalah potensi hutan seluas 1.236.836 hektar di Kabupaten Nunukan dan seluas 4.205.000 hektar di Kabupaten Malinau yang dapat di kembangkan dan di kontrol kekayaanya agar tidak terjadi pencurian secara illegal.

Di mana kekayaan alam di sana selain menghasilkan kayu alam, kawasan hutan di wilayah perbatasan juga menghasilkan hasil hutan yang mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi seperti kayu gaharu, sarang burung walet, damar, rotan, dan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat untuk obat-obatan.

Untuk potensi tambang yang dimiliki antara lain migas, emas, uranium, batubara, batu permata dan lain-lain dengan kondisi tanah yang rata-rata podzolik dengan curah hujan yang cukup. Wilayah perbatasan sangat ideal bila dijadikan kawasan perkebunan khususnya tanaman kelapa sawit, kakao, karet dan hutan tanaman industri.

Faktor lainnya pada kekayaan pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi bagi pemasukan pendapatan daerah yang berdampak pada peningkatan perekonomian daerah. Kekuatan wisata di wilayah perbatasan ini antara lain wisata alam (ecotourism) yaitu wisata hutan, wisata sungai, arung jeram, dan wisata bahari.

Selain itu mendorong terjadinya hubungan regional maupun bilateral antara Provinsi Kalimantan Utara dan daerah perbatasan Malaysia yang lebih berkelanjutan, sehingga dapat mengatasi berbagai persoalan antara Indonesia – Malaysia dengan formulasi win-win solution, antara lain pengawasan yang lebih ketat terhadap illegal logging, illegal fishing, trafficking, penyelundupan obat-obat terlarang, pencampuran wilayah, dan penyelesaian masalah tenaga kerja

Alasan keenam yaitu mendukung kegiatan pengawasan wilayah Indonesia, utamanya di perbatasan seperti di Blok Ambalat, agar kasus Sipadan dan Ligitan tidak terulang kembali. Dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik serta untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara.

Di mana dalam melaksanakan otonomi daerah, Provinsi Kalimantan Utara perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari berbagai pentingnya peran Kalimantan Utara sebagai penanganan permasalahan perbatasan. Ada juga alasan kenapa pemerintah itu memiliki dukungan kuat untuk di mekarkan di karenakan banyak kalangan berpendapat wajar pemerintah dan DPR RI memprioritaskan Kalimantan Utara menjadi daerah otonomi baru yang terpisah dengan Provinsi Kalimantan Timur. Menengok ke belakang, maka lahir Kalimantan Utara bisa diartikan sebagai jawaban dari janji Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sejak awal kepemimpinannya sudah berulang kali bertekad mengatasi berbagai masalah

Janji presiden tersebut, di antaranya disampaikan dalam pidato kenegaraan 15 Agustus 2008 dalam pidato panjang itu, di mana Presiden memang hanya menyinggung wilayah perbatasan dalam dua alenia dengan nada yang penuh dengan semangat serta menekankan pendekatan aspek ekonomi dengan di sertai dengan pendekatan aspek keamanan.

Di mana penjelasan secara terperinci dalam pidato itu ialah pembangunan wilayah perbatasan, kita lakukan melalui pendekatan beberapa aspek terutama aspek demarkasi dan delimitasi garis batas Negara disamping melalui pendekatan pembangunan kesejahteraan, politik, hukum, dan keamanan. Prinsipnya adalah, wilayah perbatasan harus kita anggap sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bukannya halaman belakang dari sisi berbagai kebijakan, maka arah pembangunan wilayah perbatasan pada Pemerintahan Presiden susilo bambang yudhoyono tampaknya sudah tepat, yakni tidak hanya pada pendekatan keamanan namun juga pendekatan ekonomi.

Untuk mendukung langkah tersebutlah Presiden mendukung terbentuknya Kalimantan utara karena di nilai sejalan dengan keinginan warga utara Kalimantan Timur dalam mengatasi berbagai masalah di wilayah perbatasan. terutama untuk kondisi pembangunan wilayah perbatasan yang sangat tertinggal ketimbang daerah lain di Kalimantan. Timur. Di mana wilayah perbatasan di Kalimantan timur yang di nilai minim dengan infrastruktur perhubungan dan komunikasi yang telah menjadi kawasan empuk bagi pelaku tindak kejahatan yang diperkirakan merugikan Negara.

Tindak kejahatan yang secara ekonomis sangat merugikan negara antara lain dari kegiatan pembalakan liar, penambangan tanpa izin, pencurian ikan,

penyelundupan, peredaran Narkoba dan TKI ilegal. Selain kasus tersebut, keteringgalan pembangunan perbatasan melahirkan dua bentuk kejahatan lain yang sangat merugikan bagi Indonesia, yakni kawasan perbatasan diduga menjadi pintu gerbang keluar masuk teroris serta ancaman kehilangan wilayah. Di mana semua persoalan itu akan terpecahkan ketika perbatasan menjadi sebuah Provinsi Kalimantan utara.

Di mana hal tersebut juga di dukung oleh Pengamat perbatasan dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Prof Sarosa Hamongpranoto, SH Mhum dan Wakil Ketua DPRD Kaltim H. Ajie Sofyan Alex sepakat bahwa keberadaan Provinsi Kalimantan Utara sangat strategis dalam mengatasi berbagai persoalan wilayah perbatasan di utara Kalimantan Timur tersebut. Dengan Harapan terbetuknya Provinsi Kaltara maka pengawasan di wilayah perbatasan akan lebih ketat karena akan dibentuk pula berbagai lembaga, badan dan instansi setingkat provinsi. Misalnya pembentukan Polisi Daerah (Polda), Komando Resort Milite (Korem), Kantor Bea Cukai dan lembaga lain yang terkait masalah pengawasan dan percepatan pembangunan kawasan itu.

Tidak hanya dukungan dari para tokoh masyarakat saja, dukungan juga dari pemerintah – pemerintah kabupaten di perbatasan yang akan menjadi bagian Kalimantan utara dengan memberikan hibah agar Kalimantan utara dapat berjalan dengan baik, bentuk dukungan hibahnya sebagai barikut, pertama Pemerintah Kabupaten Bulungan sesuai dengan kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama

2 (dua) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Gubernur dan/atau

Wakil Gubernur Kalimantan Utara pertama kali sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Dukungan kedua dapat dari Pemerintah Kota Tarakan sesuai dengan kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) untuk tahun pertama dan untuk tahun kedua ditentukan kemudian serta untuk pelaksanaan pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Kalimantan Utara pertama kali sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dukungan ketiga datang dari Pemerintah Kabupaten Nunukan sesuai dengan kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) untuk tahun pertama dan untuk tahun kedua ditentukan kemudian serta untuk pelaksanaan pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Kalimantan Utara pertama kali sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dukungan keempat Pemerintah Kabupaten Malinau sesuai dengan kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) untuk tahun pertama dan untuk tahun kedua ditentukan kemudian serta untuk pelaksanaan pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Kalimantan Utara pertama kali sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dukungan kelima datang dari Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tahun pertama dan untuk tahun kedua ditentukan kemudian serta untuk pelaksanaan pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Kalimantan Utara pertama kali sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dukungan terakhir datang dari provinsi Kalimantan timur itu sendiri, yaitu memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) untuk tahun pertama dan untuk tahun kedua ditentukan kemudian serta untuk pelaksanaan pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Kalimantan Utara pertama kali sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)⁴⁷.

Dalam bidang perdagangan untuk perbatasan peran Kalimantan Utara yang strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia bisa dioptimalkan. Contohnya perdagangan antarnegara di perbatasan saat menjadi bagian Kalimantan Timur selama ini berjalan secara tradisional. Namun diharapkan nantinya bisa berjalan sesuai standar perdagangan global dengan melakukan kerjasama perdaganagan yang baik dengan Malaysia, karena provinsi memiliki akses untuk melakukan itu sehingga bisa bermanfaat besar bagi devisa Negara⁴⁸.

Dukungan terhadap di berikanya peran Kalimantan utara sebagai penanganan permasalahan di perbatasan datang dari dewan perwakilan Rakyat

⁴⁷ UU NO 12 Tahun 2012

⁴⁸ "KZ" 1. 4. "Sinjikan Dini Dengan Malaysia" www.enterekalim.com

menyatakan pembentukan provinsi baru ini diperlukan guna membangun ketahanan di wilayah perbatasan. Provinsi ini di bentuk untuk menghidupkan ekonomi masyarakat di wilayah itu, yang selama ini dianggap tertinggal. Di mana Letaknya yang berbatasan langsung dengan Malaysia, membuat sebagian warganya tergantung kepada Malaysia. Bahkan membuat warga lebih banyak membeli produk dari Malaysia dan bahkan di beberapa daerah perbatasan, mata uang Ringgit menjadi alat pembayaran sah ketimbang Rupiah.

Permasalahan – permasalahan Inilah yang dikhawatirkan para politisi di DPR yang membuat mereka akhirnya mendukung pembentukan provinsi baru. Dengan alasan lainya ketika menjadi hanya sebuah kabupaten kontrol pemerintah pusat terlalu jauh, sehingga permasalahan tidak mendapat tanggap darurat yang cepat sehingga sulit untuk mensejahterakan masyarakat karena tidak bisa dilayani secara maksimal tentang keluhan kesah masyarakat. Untuk itulah pemerintahan Kalimantan utara di bentuk, di mana akan ada pusat pemerintah di perbatasan yang seluruhnya itu akan secara tidak langsung akan terkontrol oleh pusat sehingga kendali pelayanan baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan di bidang pelayanan public dapat terkontrol dengan baik.

Ketika pelayanan menjadi baik cepat atau lambat akan ada pola kebijakan ekonomi, kebijakan pembangunan oleh pemerintahan yang ada di perbatasan, yang pemerintahan tersebut punya otoritas mandiri dengan prioritas segala aspek untuk penanganan perbatasan. Meski secara resmi telah dibentuk tetapi pemilihan kepala daerah Kalimantan Utara baru akan dilakukn dua tahun

mendatang, dan untuk sementara selama sembilan bulan kedepan Kementerian Dalam Negeri akan menunjuk seorang pejabat gubernur⁴⁹.

Dukungan dari para bupati kabupaten – kabupaten yang ada di perbatasan karena dengan adanya pemerintahan provinsi di perbatasan akan dianggap pembangunan dan perbaikan sarana di perbatasan akan lebih diperhatikan pemerintah pusat di mana sekaligus akan menjaga kedaulatan negara. Di mana para kepala daerah berpendapat dengan adanya pemerintahan provinsi ia yakin pemerintah pusat tidak akan membiarkan pemerintah daerah provinsi di perbatasan berkutut dengan masalah yang tidak pernah selesai. Masalah itu, antara lain, infrastruktur jalan yang tidak kunjung usai sehingga dapat berujung pada mahalannya harga barang dan jasa.

Tidak hanya para bupati yang mendukung tokoh masyarakat sekaligus penggerak untuk Kalimantan utara mengambil peran di perbatasan dia adalah Dr Yusuf SK, Mantan Walikota Tarakan, di mana menurutnya salah satu yang membuat wilayah perbatasan jadi jauh tertinggal dari wilayah lainnya adalah karena wilayah yang terisolasi. Tidak hadirnya kasih sayang negara di Wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan demikian luas, kaya akan potensi SDA tetapi tidak atau belum bisa memberikan manfaat bagi warganya karena minimnya pelayanan negara tidak memadainya infrastruktur serta sarana dan prasaranan yang memungkinkan wilayah tersebut dapat tumbuh secara tidak wajar.

Sejarah dibentuknya Provinsi Kalimantan Utara, bukanlah berdasarkan pertimbangan yang mudah dan singkat. Terbentuknya provinsi penuh

⁴⁹ Kalimantan Utara resmi jadi provinsi baru" www.bha.co.uk/indonesia, 25 October 2012, 17:54

pertimbangan yang matang dan cukup lama sejak tahun 2000 yakni melalui rekomendasi Gubernur Kalimantan Timur. Hasil pertimbangannya ketika itu adalah luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang 1,5 kali lebih luas dari Pulau Jawa. Padahal, di Pulau Jawa terdapat 6 (enam) provinsi. Sehingga, luasnya wilayah Kalimantan Timur melebihi Pulau Jawa menyulitkan rentang kendali Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, terutama pada kawasan perbatasan sehingga pembangunan sulit untuk di kontrol pihak pusat⁵⁰.

Dukungan pembentukan juga turut di berikan oleh para tokoh adat dengan adanya pertemuan antara Yurnalis Ngayoh selaku Ketua Dewan Pembina Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur, Ketua Tim Pembentukan Provinsi Kalimantan utara Jusuf SK, dan Ketua DAD Kalimantan timur Edy Gunawan Arex bersama dengan Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Agustin Teras Narang di Istana Isen Mulang- Palangkaraya (Kalimantan Tengah), dibahas mengenai isu kondisi yang terjadi di wilayah utara Pulau Kalimantan tersebut.

Di mana dalam pertemuan tersebut juga di bahas alasan perlunya pembentukan Provinsi Kalimantan utara, alasannya yaitu lemahnya kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah perbatasan yang kurang tersentuh. Ini disebabkan antara lain karena terhambatnya koordinasi pembangunan pemerintah untuk melakukan pembangunan di berbagai sektor untuk perbatasan yang tidak sampai ke daerah pedalaman di karenakan pemerintah hanya fokus pada 1 (satu) bidang saja untuk perbatasan, yakni keamanan.

⁵⁰ *"Provinsi Kalimantan Utara, Harapan Baru Masyarakat Perbatasan Kalimantan"*
wartaekonomi.co.id, 05 Agustus 2013 05:25:00 WIB

Isu yang selalu mencuat seputar perbatasan adalah pengamanan wilayah Indonesia dari caplokkan negara tetangga sehingga memperlemah aspek lainnya. Sehingga alasan dengan harapan lahirnya pemekaran wilayah baru ini adalah lahirnya sebuah daerah tingkatan provinsi sebagai wakil pusat menjadi fokus daerah baru yang dapat melahirkan lancarnya pelayanan kepada masyarakat perbatasan hingga ke pelosok, serta pembangunan yang memang di-perlukan wilayah perbatasan dengan menyesuaikan karakter dan budaya setempat yang di perlukan dan peningkatan kesejahteraan yang nyata ke perbatasan.

Di mana asumsi prioritas hadirnya Kalimantan utara adalah menghadirkan solusi kepada persoalan kesejahteraan, peningkatan ekonomi, pembangunan struktur dan infrastruktur akan tercapai maksimal bila daerah perbatasan kelola oleh suatu pemerintahan dalam bentuk provinsi.

Tidak hanya masyarakat lokal yang mendukung lembaga legislatif selain DPR RI sebagai pembuat kebijakan DPD RI pun mendukung terlihat dari argumentasi lembaga DPD RI dalam rancangan undang – undang pembentukan provinsi Kalimantan utara atas pemekaran wilayah Kalimantan Timur.

Di mana menurut lembaga DPD RI pembentukan Kalimantan utara sangat baik, karena secara tidak langsung akan mendukung kegiatan pengawasan wilayah NKRI di beberapa daerah khususnya di wilayah air ambalat yang jaraknya hanya 15 menit dari Bandar udara international tarakan, demikian pula dengan KRI – KRI TNI AL akan lebih lama dan terus menerus mengawasi dan menghalau segala kegiatan yang dapat mengancam keutuhan NKRI seperti kegiatan provokatif dari kanal – kanal negara Malaysia di lautan.

pangkalan utama TNI AL yang sedang di bangun di tarakan dekat dengan kawasan ambalat

Selanjutnya alasan DPD RI mendukung terbentuknya provinsi Kalimantan utara karena menyangkut permasalahan penanganan tenaga kerja Indonesia. Di mana di harapkan dengan hadirnya provinsi Kalimantan utara dapat memberikan solusi tentang permasalahan TKI yang ada di sabah dan serawak – Malaysia di mana ada sekitar 217.000 pekerja yang mana di antaranya berstatus illegal yang retan terhadap penyelundupan dan perdagangan manusia serta perilaku yang tidak manusiawi. Serta terdapat sekitar 45.000 anak – anak yang tidak dapat sekolah di wilayah perbatasan maupun di negeri tetangga.

Harapan lain dengan adanya Kalimantan utara juga dapat membuat terjalinnya hubungan regional bilateral antara provinsi Kalimantan utara dengan sabah yang lebih intensif. Sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dengan formulasi yang saling menguntungkan dan menjalin kerjasama terhadap pengawasan kejahatan yang ada di perbatasan seperti, human trafficking, illegal logging, illegal fishing, dan kejahatan international lainnya.

Pembentukan Kalimantan Utara memang sangat perlu di karenakan wacana pemekaran Kalimantan Utara sendiri sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2000 di mana dalam perjalanan waktu pada tanggal 25 oktober 2012 baru di sahkan.

Keterlambatan terjadinya pemekaran di karenakan terbentur oleh moratorium pemekaran daerah. Padahal pemekaran daerah Provinsi kalimantan Timur bagian utara menjadi sebuah Provinsi Kalimantan Utara dianggap penting dan mendesak mengingat sebagian wilayah Kalimantan timur dibagian utara

berbatasan langsung dengan Malaysia Timur Negara bagian Sabah dan Sarawak. Mengingat kesenjangan pembangunan wilayah selatan Kalimantan Timur dengan wilayah utara Kalimantan Timur sangat jauh karena akibat dari jauhnya pusat pemerintahan dari wilayah perbatasan.

Untuk itu salah satu upaya dalam mengatasi ketimpangan pembangunan adalah pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan. Hal ini telah dilaksanakan dengan adanya Provinsi Kalimantan Timur akan tetapi dengan luas wilayah yang 1,5 kali lebih besar dari Pulau Jawa ditambah Madura tentu menjadi kendala nyata dalam pemerataan pembangunan.

Selain itu juga letak daerah utara yang berada di sepanjang perbatasan yang penuh dengan masalah sosial yang timbul seperti lebih Malaysia di mana masyarakat lebih mengenal hadirnya Malaysia, serta ketergantungan daerah perbatasan pada negara tetangga yakni Malaysia menyebabkan hal ini sebagai masalah sangat serius dan mendesak dan pada akhirnya pemekaran wilayah dianggap sebagai suatu solusi strategi percepatan dan pemerataan pembangunan daerah perbatasan bagian utara. Karena proposional pembangunan yang merata akan terjadi.

Peran yang Kalimantan Utara yang terakhir untuk permasalahan perbatasan yaitu dengan memperhatikan kenyataan di mana dengan pemekaran adalah pemisahan suatu wilayah dari daerah administratif lama untuk membentuk daerah suatu administratif baru. Perluasan biasanya terjadi pada daerah perkotaan yang baru dari sebuah lahirnya pemekaran apabila perkembangan pembangunan sudah meluas tentu daerah yang semula desa mulai berubah struktur

perekonomiannya menjadi daerah perkotaan. Untuk fenomena seperti ini sering terjadi di negara maju.

Namun dari semua alasan tersebut alasan yang sangat penting dari semuanya adalah pendekatan analisa yang digunakan adalah dari sisi permintaan mengingat keinginan untuk melakukan pemekaran daerah datang dari permintaan masyarakat sendiri yang kemudian disalurkan melalui lembaga- lembaga resmi di daerah seperti DPRD dan Pemerintah daerah, yang kemudian diusulkan ke pemerintah pusat dengan berbagai alasan pentingnya pemekaran provinsi baru

agar peran pemerintah kabupaten menjadi mandiri sesuai dengan tuntutan